



MISI INDONESIA DALAM SIDANG MAJELIS UMUM PBB 2017

Sita Hidriyah*)

Abstrak

Kehadiran Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2017 telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengemukakan pandangan-pandangan strategisnya terkait berbagai isu global, dan untuk berkampanye terkait misi Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019-2020. Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan satu kursi yang dialokasikan bagi Kelompok Asia Pasifik. Keanggotaan Indonesia dalam DK PBB memiliki arti penting, karena Indonesia dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan PBB terkait penanganan masalah-masalah keamanan internasional. Misi Indonesia tersebut sudah seharusnya didukung oleh semua pihak, termasuk oleh DPR.

Pendahuluan

Wakil Presiden Jusuf Kalla mewakili Pemerintah Indonesia pada minggu ketiga bulan September 2017 untuk menghadiri sidang Tahunan Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), yang kali ini mengambil tema *'Peace and a Decent Life for All on a Sustainable Planet'*. Sidang tahunan PBB ke-72 yang diselenggarakan pada 18-23 September 2017 tersebut dihadiri oleh para pimpinan negara, menteri, dan delegasi lainnya dari 193 negara anggota PBB. Kehadiran delegasi Indonesia dalam sidang tahunan PBB

kali ini sedikit berbeda dibanding tahun sebelumnya, karena selain dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyampaikan pandangan-pandangan strategisnya terkait isu global sesuai dengan tema sidang, juga untuk berkampanye terkait pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019-2020. Tulisan ini akan mengkaji secara singkat mengenai upaya Indonesia untuk kembali menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB dan makna keanggotaan DK PBB bagi Indonesia.

*) Peneliti Muda Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: sita.hidriyah@dpr.go.id



Tabel 1. Anggota Dewan Keamanan PBB

No.	Negara	Regional	Periode
Anggota Tetap			
1.	Amerika Serikat	Eropa Barat dan lainnya	Sejak 1946
2.	Inggris	Eropa Barat dan lainnya	Sejak 1946
3.	Perancis	Eropa Barat dan lainnya	Sejak 1946
4.	Rusia	Eropa Timur	Sejak 1991 menggantikan Uni Soviet
5.	China	Asia Pasifik	Sejak 1971 menggantikan Taiwan
Anggota Tidak Tetap			
6.	Bolivia	Amerika Latin dan Karibia	2017 – 2018
7.	Ethiopia	Afrika	2017 – 2018
8.	Italia	Eropa Barat dan lainnya	2017 – 2018
9.	Jepang	Asia Pasifik	2016 – 2017
10.	Kazakhstan	Asia Pasifik	2017 – 2018
11.	Mesir	Afrika	2016 – 2017
12.	Senegal	Afrika	2016 – 2017
13.	Swedia	Eropa Barat dan lainnya	2017 – 2018
14.	Ukraina	Eropa Timur	2016 – 2017
15.	Uruguay	Amerika Latin dan Karibia	2016 – 2017

Sumber: diolah dari berbagai sumber.

Upaya Indonesia Menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB

Indonesia membawa misi penting dalam sidang tahunan Majelis Umum PBB 2017, yakni melakukan penggalangan dukungan untuk kembali menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB. Anggota DK PBB sendiri berjumlah 15 negara, terdiri dari 5 Anggota Tetap dan 10 Anggota Tidak Tetap yang diganti setiap dua tahun sekali mewakili kelompok suatu kawasan. Keseluruhan Anggota DK PBB saat ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Untuk mencapai misi menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya diplomatik dalam rangka meraih dukungan, antara lain dengan melakukan lobi-lobi politik dan kampanye ke sejumlah negara, terutama negara-negara kelompok Asia Pasifik, dan hal itu telah dilakukan secara intensif sejak tahun 2014. Pemerintah Indonesia sejauh ini berpandangan optimis bahwa peluang Indonesia untuk kembali menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB akan diraih, mengingat berbagai kelebihan dan pengalaman yang dimiliki Indonesia, antara lain Indonesia selalu aktif dalam berbagai fora

internasional, bahkan pernah menjadi tuan rumah sejumlah pertemuan internasional, dan juga sering disebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Di fora internasional, Indonesia memang termasuk negara yang cukup terpadang dalam penanganan isu-isu global. Hal ini terlihat misalnya ketika Indonesia meratifikasi perjanjian internasional mengenai perubahan iklim sebelum perjanjian itu mulai berlaku. Ratifikasi tersebut sangat dihargai oleh banyak anggota PBB dan menjadi nilai positif untuk pencalonan di DK PBB.

Dalam berbagai kesempatan, Pemerintah Indonesia juga sering mengkampanyekan Indonesia sebagai *true partner for peace and security*, yang berarti mitra yang selalu dapat memberikan sumbangan pada kerja sama di PBB dalam menciptakan perdamaian dan keamanan. Kampanye tersebut diharapkan dapat terus dilakukan, tidak saja oleh Kementerian Luar Negeri, tetapi juga oleh lembaga dan para pemangku kepentingan lainnya, seperti Kementerian Pariwisata, unsur media, dan juga parlemen.

Upaya lain pemerintah Indonesia dalam mencapai misi keanggotaan DK PBB adalah melakukan promosi melalui

pemakaian logo dukungan di berbagai forum internasional dan media sosial yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri. Perjuangan untuk mendapat dukungan seluas mungkin juga dilakukan melalui pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral yang dilakukan Menteri Luar Negeri dengan para pihak dari negara-negara sahabat. Singkatnya, telah banyak upaya yang dilakukan Indonesia, dan pada akhirnya akan ditentukan oleh suara dukungan negara anggota PBB, minimal harus mendapatkan suara 2/3 anggota, jika ingin terpilih. Untuk itu Indonesia setidaknya harus mendapat dukungan dari 130 negara.

Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan satu kursi yang dialokasikan bagi Kelompok Asia Pasifik. Dari segi pengalangan, Indonesia sudah memiliki pengalaman yang cukup karena sudah tiga kali menjabat sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB, yaitu pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Dalam proses pemilihan, Indonesia akan dinilai oleh negara anggota PBB lainnya dari berbagai aspek, seperti aspek ekonomi dan politik keamanan. Kapasitas ekonomi dan politik keamanan yang memadai sangat penting, karena negara yang menjadi anggota DK PBB dapat fokus untuk memikul tanggung jawab yang besar di PBB, dan juga bisa berkonsentrasi untuk menjalankan tugasnya yang penting sebagai Anggota DK PBB.

Makna Keanggotaan Dewan Keamanan PBB Bagi Indonesia

Merujuk kepada keanggotaan DK PBB, peran yang dapat dilakukan oleh anggota DK PBB, termasuk oleh Indonesia jika terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB antara lain:

1. Memberikan masukan dan pengaruh terhadap isu-isu penting di bidang perdamaian dan keamanan internasional;
2. Memainkan peran penting dalam hal-hal yang berkaitan dengan wilayah geografis masing-masing, sebagai contoh negara-negara Arab berkaitan dengan isu Timur Tengah;
3. Membangun sebuah koalisi apabila anggota DK PBB termasuk dalam organisasi atau kepentingan yang sama dan tidak mencapai keputusan bulat untuk sebuah masalah agar tercapai suatu solusi atau keputusan;

4. Memberi kesempatan kepada Anggota Tidak Tetap untuk melindungi kepentingannya dan menempatkan isu-isu yang penting bagi mereka dalam isi dokumen yang dinegosiasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, Anggota Tidak Tetap tidak hanya memainkan peran penting dalam proses menegosiasikan isi dokumen, tetapi juga mulai mempresentasikan proposalnya sendiri untuk mendapatkan solusi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat bahwa jika Indonesia kembali terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, peran Indonesia di panggung internasional akan mendapat pengakuan, khususnya dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini sejalan dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang antara lain mengamanatkan agar pemerintah negara Indonesia yang dibentuk *"...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..."*.

Fakta lain menunjukkan bahwa kontribusi Indonesia dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia adalah sangat besar, seperti terlihat dalam pengiriman Pasukan Perdamaian PBB ke sejumlah kawasan dunia, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi Rohingya. Peran aktif Indonesia inilah yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-11 dalam daftar negara kontributor terbesar pasukan misi perdamaian PBB. Pemerintah Indonesia bahkan menargetkan untuk mengirim lebih banyak lagi personel pasukan perdamaian PBB, yakni mencapai 4.000 personel hingga tahun 2020. Contoh tersebut merupakan bukti adanya kontribusi Indonesia dalam lingkup global.

Apabila Indonesia terpilih, Indonesia akan memperoleh pengakuan dari negara lain atas kontribusinya terhadap perdamaian dunia. Indonesia dapat lebih banyak berbicara dan menunjukkan sikapnya dalam berbagai isu dunia. Merujuk kepada sistem yang ada dalam PBB, dalam membahas berbagai isu penting yang menjadi fokus perhatian dunia, khususnya yang berkaitan dengan isu politik dan keamanan, pembahasan awal dilakukan oleh DK PBB. Di sinilah suara Indonesia dapat didengar dan pengaruh Indonesia dapat dirasakan jika

Indonesia terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB.

Berkaitan dengan dukungan yang diperoleh, terdapat tiga bentuk dukungan yang diberikan kepada suatu negara untuk menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB. Pertama, dukungan timbal balik dari negara yang sebelumnya yang pernah didukung Indonesia dalam mendapatkan status keanggotaan DK PBB. Bentuk dukungan kedua adalah dukungan unilateral, di mana beberapa negara memberikan dukungan kepada Indonesia tanpa perjanjian apa pun. Selain itu, dukungan juga dapat berasal dari hubungan bilateral yang disampaikan melalui pernyataan lisan maupun tertulis.

Penutup

Sidang Tahunan Majelis Umum PBB menjadi salah satu momentum bagi Indonesia untuk menyampaikan pandangan-pandangan dan misi strategisnya di tingkat global, termasuk misi untuk menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB. Dengan menjadi Anggota DK PBB, meskipun Anggota Tidak Tetap, Indonesia dapat lebih berperan dalam memperjuangkan kepentingan internasional, terutama dalam mendukung terwujudnya keamanan dan perdamaian dunia. Peluang Indonesia untuk kembali menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB cukup besar, terutama jika dikaitkan dengan berbagai kelebihan dan pengalaman yang dimiliki Indonesia selama ini, antara lain selalu aktif dalam berbagai kegiatan internasional dalam kerangka PBB, termasuk pernah menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB pada beberapa periode yang lalu. Upaya pemerintah Indonesia untuk kembali memperjuangkan keanggotaan Indonesia di DK PBB perlu terus didukung oleh semua pemangku kepentingan, termasuk oleh DPR melalui aktivitas diplomasi parlemennya, hingga menjelang waktu pemilihan Anggota Tidak Tetap DK PBB pada Juni 2018.

Referensi

- “Alasan Indonesia Ingin Jadi Anggota Tak Tetap DK PBB”, <https://international.sindonews.com/read/1135863/40/alasan-indonesia-ingin-jadi-anggota-tak-tetap-dk-pbb-1472718354>, diakses 4 Oktober 2017.
- “Indonesia Bidik Posisi Anggota DK PBB”, *Media Indonesia*, 14 September 2017.
- “Indonesia Berpeluang Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB”, <http://www.antaraneews.com/berita/587605/indonesia-berpeluang-jadi-anggota-tidak-tetap-dewan-keamanan-pbb>, diakses 9 Oktober 2017.
- “Indonesia Kembali Berambisi Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB”, <https://www.merdeka.com/dunia/indonesia-kembali-berambisi-jadi-anggota-tidak-tetap-dk-pbb.html>, diakses 3 Oktober 2017.
- “Isi Pidato JK di Majelis Umum PBB”, *Republika*, 22 September 2017.
- “Ketika Jusuf Kalla Angkat Indonesia di Hadapan Majelis Umum”, *Kompas*, 22 September 2017.
- “Menilik Peluang Indonesia Menuju Keanggotaan DK PBB”, <http://www.antaraneews.com/berita/631958/menilik-peluang-indonesia-menuju-keanggotaan-dk-pbb>, diakses 3 Oktober 2017.
- “Misi Indonesia Merebut Kursi Dewan Keamanan”, *Kompas*, 18 September 2017.
- “Role of Non-permanent Members In The Work Of The Security Council”, http://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/poland_candidacy_unsc/rb_informacje_ogolne_eng/role_of_members/, diakses 9 Oktober 2017.
- “Upaya Diplomasi Delegasi Indonesia Pada Sidang Majelis Umum PBB”, <https://www.voaindonesia.com/a/upaya-diplomasi-delegasi-indonesia-pada-sidang-majelis-umum-pbb/4036542.html>, diakses 3 Oktober 2017.